

## ABSTRAK

### **Konflik di Tapal Batas Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Bengkulu: *Studi Kasus* Tuntutan Masyarakat Nagari Silaut dan Masyarakat Desa Tanjung Mulya (SP-9) Terhadap Penggunaan Lahan**

**Oleh: Radiyah**

Konflik tapal batas antara Nagari Silaut Propinsi Sumatera Barat dan Desa Tanjung Mulya (SP-9) Propinsi Bengkulu sudah terjadi dari tahun 1995, bahkan sampai pada tahun 2012 belum terselesaikan. Para elit pemerintahan dari kedua daerah yang bersengketa telah melakukan pertemuan, diantaranya tahun 2000, 2007 dan 2009 untuk menyelesaikan masalah tapal batas tersebut. Dari pertemuan itu mensepakati daerah yang menjadi sengketa tersebut berstatus quo. Kesepakatan itu telah disosialisasikan, namun kesepakatan tersebut tidak dijalankan oleh masyarakat Nagari Silaut dan masyarakat Desa Tanjung Mulya (SP-9). Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap mengapa masyarakat Nagari Silaut dan Masyarakat Desa Tanjung Mulya (SP-9) tidak menjalankan hasil kesepakatan bersama tentang penetapan daerah status quo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik erat kaitannya dengan otoritas. Kekuasaan itu hakekatnya tidak di dalam pribadi-pribadi melainkan dalam posisi-posisi yang ditempati. Untuk persoalan konflik tapal batas antara Nagari Silaut dan Desa Tanjung Mulya (SP-9), terlihat bagaimana para elit pemegang otoritas menggunakan otoritasnya dalam menyelesaikan konflik. Otoritas secara tersirat menyatakan dua kelompok yang bertentangan, yakni superordinasi dan subordinat. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Kelompok penguasa ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan kelompok yang dikuasai ingin adanya sebuah perubahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus intrinsik. Informan penelitian ini berjumlah 36 orang. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi partisipasi pasif, studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Peneliti melakukan triangulasi data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini yaitu mengungkap alasan masyarakat Nagari Silaut dan Masyarakat Desa Tanjung Mulya (SP-9) tidak menjalankan kesepakatan tentang penetapan daerah status quo adalah: (1) penetapan daerah status quo merugikan ekonomi masyarakat; (2) sebagai tuntutan masyarakat atas ketidakjelasan status dan administrasi tanah kepada pemerintah. Reaksi tersebut bertujuan untuk mendapat perhatian pemerintah agar dapat menyelesaikan konflik tersebut.